



RENCANA AKSI

KEUANGAN

BERKELANJUTAN

PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA

2026

DEWAN KOMISARIS

PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA

Menyetujui :

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2026

Disetujui

DEWAN KOMISARIS



I KETUT WIDIANA KARYA
Komisaris Utama



NGAKAN PUTU MIHARJANA
Komisaris



BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Misi Keuangan Berkelanjutan	2
Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	2
Road Map Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	3
Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan	4

BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Rujukan yang Digunakan Sebagai Acuan	5
Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	5

BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Rencana Strategis BDF	6
Kapasitas Organisasi Saat ini	6
Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis Saat ini	9
Strategi Komunikasi	12
Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Mitigasi	14
Kerjasama Dengan Pihak Eksternal	14

BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dasar Pemikiran	15
Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	17
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	18
Sumber Daya	19
Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program	21

BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

PIC Penanggung Jawab Monitoring & Evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan	22
Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	22
Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	23
Mitigasi Risiko	23

BAB VI PENUTUP

Penutup	26
---------	----

POJK 51/2017 bukan sekadar regulasi teknis, tetapi merupakan fondasi dari transformasi ekonomi nasional menuju arah yang lebih hijau, adil, dan bertanggung jawab. Melalui keuangan berkelanjutan, sektor jasa keuangan Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan adalah peluang emas untuk membuktikan bahwa bisnis dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan. Dengan komitmen semua pihak, Indonesia dapat menjadi contoh global dalam membangun ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga lestari. Dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan dan mendukung Roadmap Keuangan Berkelanjutan Pemerintah Indonesia, diperlukan adanya pendekatan dan kerja sama secara menyeluruh dari berbagai sektor dan industri. Dukungan tersebut salah satunya dari sektor lembaga jasa keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana, penyalur pembiayaan, maupun investasi. Dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan, Perusahaan diwajibkan untuk membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) guna mendorong kesadaran terhadap isu keberlanjutan (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola/LST) dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Negara.

PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF) sebagai salah satu perusahaan modal ventura, sangat memahami eratnya hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan kelestarian lingkungan sekitar dan eratnya hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan masalah-masalah sosial.

Oleh karenanya, perusahaan mendukung penuh upaya Pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmennya dalam mencapai berbagai tujuan keberlanjutan. BDF berkomitmen untuk memberikan nilai di setiap siklus bisnis dan pasar dalam proses penciptaan hasil terbaik untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab sosial.

BDF termasuk dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga BDF memiliki kewajiban untuk menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). BDF senantiasa berkomitmen untuk mempertahankan posisinya dan terus melakukan pengembangan bisnis yang sudah dirancang dari tahun-tahun sebelumnya demi masa depan yang lebih baik. Penerapan keuangan berkelanjutan juga terus dilakukan dengan skala prioritas pada penyesuaian antara risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis, serta melanjutkan pengembangan kapasitas intern melalui lanjutan pelatihan pengembangan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.

Kami percaya bahwa bisnis yang dijalankan dengan tujuan mulia serta model bisnis yang sesuai dan dapat bersaing dengan kebutuhan masa depan akan menghasilkan kinerja yang baik sesuai harapan kami yang tertuang dalam RAKB tahun 2026.

1.1 Visi, Misi Keuangan Berkelanjutan PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF)

BDF telah menyusun visi dan misi khusus untuk implementasi keuangan berkelanjutan. Visi Misi ini merupakan perluasan dari visi misi perusahaan, dan selanjutnya seluruh kegiatan yang direncanakan dalam RAKB menjadi bentuk komitmen BDF akan visi misi tersebut

Visi Utama

Menjadi lembaga pembiayaan alternatif terbaik dan terpercaya bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam pelayanan jasa keuangan dan konsultasi manajemen yang ada di daerah Bali dalam mendukung transformasi ekonomi Bali

Misi Utama

Menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas serta semangat kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar dapat menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri, dan meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dalam mendukung transformasi ekonomi Bali menuju Bali era baru: maju, hijau, tangguh, sejahtera dan berkelanjutan.

Visi Keuangan Berkelanjutan

Menjadi lembaga pembiayaan alternatif terbaik dan terpercaya bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam pelayanan jasa keuangan dan konsultasi manajemen yang ada di daerah Bali serta memperhatikan kelestarian lingkungan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan

Misi Keuangan Berkelanjutan

Dalam upaya mewujudkan visi keuangan berkelanjutan, BDF memiliki misi keuangan berkelanjutan yang juga merupakan misi utama BDF yaitu menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas serta semangat kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar dapat menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri, dan meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dalam mendukung transformasi ekonomi Bali menuju Bali era baru: maju, hijau, tangguh, sejahtera dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BDF menyadari pentingnya memberikan kemanfaatan. BDF memandang perlu memastikan bahwa rencana kegiatan usaha dan program kerja memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan kepada seluruh Pemangku kepentingan, yaitu;

1. Kemanfaatan bagi Nasabah, memberikan layanan yang penuh makna, melebihi ekspektasi nasabah;
2. Kemanfaatan bagi Karyawan, membangun keunggulan kompetitif modal insani dan memungkinkan mereka bertumbuh dalam berbagi kebaikan melalui kepemimpinan, kemampuan manajerial dan interaksi sosial;
3. Kemanfaatan bagi Pemegang Saham, memberikan kinerja yang baik dan bernilai tambah serta menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan;
4. Kemanfaatan bagi Regulator, menjadi teladan dalam tata kelola perusahaan dan standar etika dalam melakukan bisnis yang sehat.
5. Kemanfaatan bagi Masyarakat, bertanggung jawab dan berkomitmen untuk berbagi kebaikan kepada komunitas dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs);

1.3 Road Map Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Road Map RAKB BDF : “Menjadi lembaga pembiayaan alternatif terbaik dan terpercaya bagi UMKM dan koperasi dalam pelayanan jasa keuangan dan konsultasi manajemen yang ada di daerah Bali” BDF memandang bahwa *financial sustainability* dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu kemampuan memperoleh laba (Profitabilitas) dengan indikator ROA, ROE, profit margin, kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek saat jatuh tempo (Likuiditas), kemampuan mengefisienkan beban dengan indikator BOPO, kemampuan memelihara aktiva produktif dengan indikator NPIF, penerapan Tata Kelola dan manajemen risiko dengan indikator profil risiko dan penilaian tata kelola.

1.3.1 Rencana 3 Tahunan

Terdapat tiga sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) fase yang masing-masing memiliki kegiatan dan program kerja yang mendukung *goals* setiap fase, yaitu;

- a. Fase “Pertumbuhan” pada tahun 2026, yaitu pencapaian target profitabilitas yang didukung oleh pertumbuhan investasi yang sehat.
- b. Fase “Kemandirian” pada tahun 2027 menitikberatkan pada penguatan struktur permodalan dan peningkatan kemampuan membukukan laba sebagai faktor utama yang menjamin *financial sustainability*.
- c. Fase “Kemanfaatan” pada tahun 2028, yaitu bertumbuh dengan kondisi “Sehat”, memiliki kemandirian dalam membiayai kegiatan usahanya dan pertumbuhannya sendiri, dan terus bertumbuh secara berkelanjutan karena telah memiliki *image* yang kuat sebagai Lembaga Keuangan Non Bank.

1.3.2 Rencana 1 Tahunan

RAKB 2026 (RAKB Jangka Pendek) berisi kegiatan dan program kerja yang termasuk dalam fase “Pertumbuhan”, yaitu;

- a. Program meningkatkan portofolio;
- b. Program penanganan pembiayaan bermasalah;
- c. Program penyesuaian kebijakan, system dan prosedur terhadap penerapan prinsip-prinsip keuangan keberlanjutan.
- d. Program internalisasi dan implementasi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan;
- e. Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

1.4 Penanggungjawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

Secara keseluruhan Aksi Keuangan Berkelanjutan dikelola oleh Kepala Divisi Operasional, dengan didukung oleh Bagian Investasi, Bagian Operasional, Bagian SDM dan Bagian Legal. Adapun rincian unit kerja berikut dengan pejabat yang berkaitan dengan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

Pejabat	Tugas & Tanggung Jawab
Direksi	Bertanggungjawab terhadap pengelolaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan secara keseluruhan
Kepala Divisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinator pelaporan didukung oleh Kepala Divisi Investasi, VCO dan seluruh bagian terkait kegiatan-kegiatan pelaporan RAKB dan Laporan Keberlanjutan; ▪ Bertanggung jawab kepada Direksi terhadap pengelolaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan secara keseluruhan melalui laporan RAKB dan laporan berkelanjutan kepada OJK.
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi risiko termasuk risiko yang melekat dalam RAKB; ▪ Mendukung melalui data untuk penyusunan RAKB; ▪ Memberikan masukan dalam Program Aksi Keuangan Berkelanjutan
Kepala Divisi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung melalui data untuk penyusunan RAKB; ▪ Menyalurkan pembiayaan kepada kegiatan usaha berkelanjutan; ▪ Membuat laporan target dan realisasi penyaluran.
Bagian Operasional (Akunting, Keuangan, dan Administrasi Investasi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung melalui data untuk pelaporan RAKB; ▪ Monitoring Penyaluran Dana Kegiatan Usaha Berkelanjutan
Bagian SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila diperlukan merekrut karyawan untuk mengisi unit khusus pengelola keuangan berkelanjutan ▪ Mengadakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi atau edukasi eksternal terkait program keuangan berkelanjutan dan penyusunan anggaran untuk kegiatan pelatihan tersebut; ▪ Menyusun pedoman internal yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional BDF.

Pejabat	Tugas & Tanggung Jawab
Divisi Legal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum ▪ Membantu dalam memberikan pendapat dan saran-saran mengenai masalah hukum ▪ Membantu dalam tugas penanganan debitur bermasalah ▪ Penilaian jaminan.

BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

2.1 Rujukan yang Digunakan Sebagai Acuan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan BDF dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2026 yaitu :

- a. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- b. Surat Keputusan No. 002/SBV/KOM/VI/2020 tentang Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PT. Sarana Bali Ventura tanggal 30 Juni 2020.

2.2 Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Sebagaimana tercantum dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, BDF yang merupakan Perusahaan Modal Ventura berkewajiban menerapkan aksi keuangan berkelanjutan mulai tanggal 1 Januari 2020.

3.1 Rencana Strategis PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF)

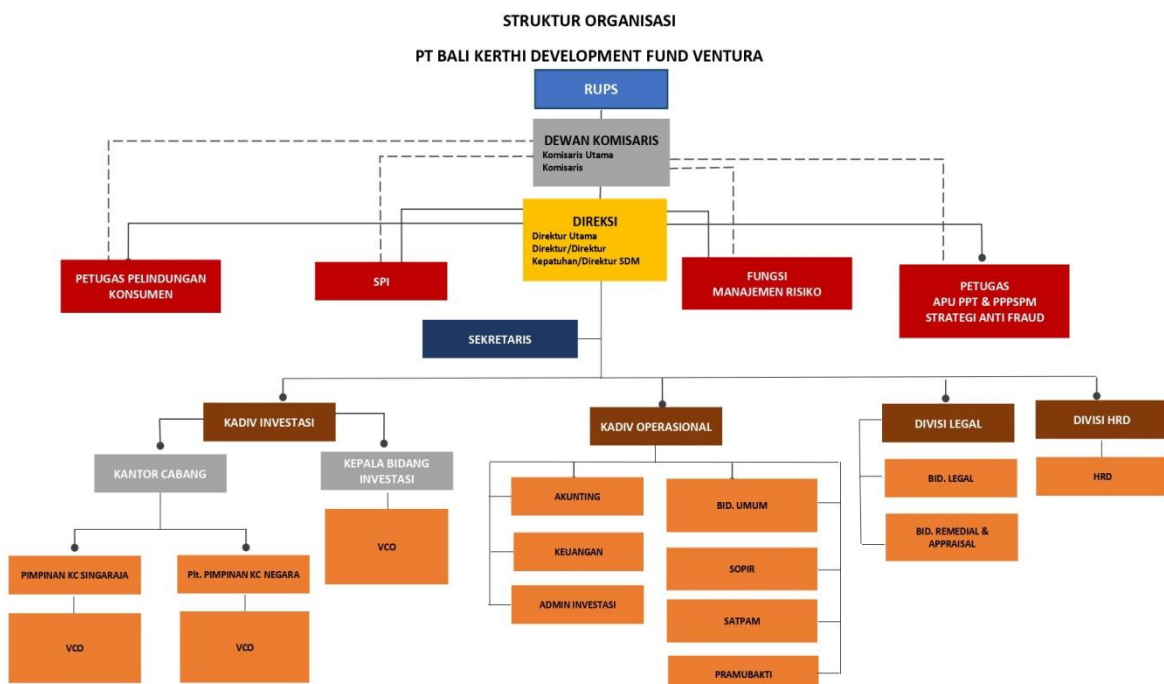
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BDF merujuk kepada Anggaran Dasar Perusahaan No.79 tanggal 10 Desember 1994, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan No.35 tanggal 28 Agustus 2025. Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi, BDF telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

- Rencana Strategis jangka menengah periode 3 tahun (2026 -2028)
- Rencana Strategis jangka pendek (2026) , merupakan rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan Rencana Bisnis Tahunan BDF.
- Rencana strategis dalam RAKB ini disesuaikan dengan rencana bisnis tahunan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris

3.2 Kapasitas Organisasi Saat Ini

3.2.1 Struktur Organisasi

Dalam upaya merealisasikan target operasional serta mewujudkan visi & misi perusahaan, BDF akan melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai kebutuhan, arah dan pengembangan bisnis yang dilakukan. Adapun struktur organisasi BDF pada saat penyusunan RAKB tahun 2026 adalah sebagai berikut:



Adapun susunan Pengurus Perseroan berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bali Kerthi Development Fund Ventura Nomor 35 tanggal 28 Agustus 2025, yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Selamat, S.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bali Kerthi Development Fund Ventura per 31 Oktober 2025 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	: I Ketut Widiana Karya
Komisaris	: Ngakan Putu Miharjana
Direktur Utama	: I Made Gunawirawan
Direktur	: Anak Agung Istri Agung Maharani

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Bagi Perusahaan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset utama sebagai penggerak utama dalam pencapaian kinerja keberlanjutan. Maka dari itu, Perusahaan sangat memperhatikan faktor SDM sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, karier, serta kesejahteraan karyawan untuk pencapaian kinerja keberlanjutan Perusahaan. Perusahaan secara bertahap akan mengembangkan pengetahuan seluruh karyawan terkait keuangan keberlanjutan, sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas yang telah direncanakan untuk mencapai indikator dan target RAKB.

a. Jumlah dan Komposisi Karyawan

BDF melakukan optimalisasi sesuai dengan kebutuhan operasional BDF.

Tabel 3.2 Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan		Total
		L	P	
1	Pasca Sarjana (S2)	1	-	1
2	Sarjana (S1)	7	10	17
3	Diploma (D1)	-	1	1
4	SMA/ sederajat	5	3	8
5	SMP	0	1	1
Jumlah		13	15	28

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa komposisi jumlah karyawan didominasi oleh karyawan dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 17 orang atau 61% dari jumlah karyawan, dan jumlah karyawan wanita adalah 15 orang (54%) dari jumlah karyawan.

Tabel 3.3 Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Tahun 2025

No	Usia (Tahun)	Jumlah Karyawan		Total
		L	P	
1	20-30	3	5	8
2	31-40	2	5	7
3	41-50	3	3	6
4	51-70	5	2	7
Jumlah		13	15	28

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa komposisi jumlah karyawan didominasi oleh karyawan dengan rentang usia 20-30 tahun dengan jumlah masing-masing 8 orang atau 29% dari jumlah karyawan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

BDF melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai arah dan tujuan organisasi, setidaknya minimal satu kali dalam setahun untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri.

b. Praktek Ketenagakerjaan yang Humanis

BDF berkomitmen untuk melaksanakan praktek pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini diwujudkan diantaranya dengan penetapan standar upah karyawan, penerapan Kesetaraan dan non diskriminasi, tidak mempekerjakan pekerja anak dan pekerja muda serta tidak menerapkan praktek kerja paksa.

3.2.3. Jaringan Kantor Layanan

Dalam rangka memberikan kemudahan akses terhadap produk dan layanan, BDF mempunyai 3 kantor yaitu:

Kantor Pusat :Denpasar

Kantor Cabang :Kantor Cabang Singaraja

:Kantor Cabang Negara



3.3 Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis Saat ini

3.3.1. Kondisi Keuangan BDF

Pencapaian kinerja keuangan BDF Per 31 Desember 2025 (Prognosa) dibandingkan dengan target (Perubahan RBT 2025) dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kinerja Keuangan PT Bali Kerthi Development Fund Ventura

RBT Perubahan 2025 dibandingkan dengan Prognosa Per 31 Desember 2025

PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA HIGHLIGHT PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TAHUN 2025					(Ribu Rupiah)
KETERANGAN	Perubahan RBT	Prognosa	Perubahan RBT	vs Prognosa	
	31 Des. 2025	31 Desember 2025	2025	2025	
			Rp	%	
A Aktiva	59.530.685	62.667.863	3.137.178	5,27%	
B Deposito	9.800.000	26.450.000	16.650.000	169,90%	
C Investasi	46.711.879	32.986.573	(13.725.306)	-29,38%	
Sehat	45.627.635	32.414.247	(13.213.388)	-28,96%	
Bermasalah	1.084.244	572.326	(511.918)	-47,21%	
D Non Performing Investmentand Financing (NPIF) Bruto	2,32%	1,74%		-0,59%	
Non Performing Investmentand Financing (NPIF) Neto	2,14%	1,48%		-0,66%	
E CKPN	568.972	276.270	(292.702)	-51,44%	
F AYDA	923.609	737.917	(185.692)	-20,11%	
G UTANG	4.137.703	7.189.617	3.051.914	73,76%	
H EKUITAS	55.392.982	55.478.246	85.264	0,15%	
I LABA (RUGI)					
Pendapatan Operasional :					
Pendapatan Dana Sendiri	4.022.092	3.483.796	(538.296)	-13,38%	
Provisi & Administrasi	628.185	442.985	(185.200)	-29,48%	
Pendapatan LPDB KUKM	20.551	23.995	3.444	16,76%	
Pendapatan PKBL PPA	3.285	3.285	-	0,00%	
Pendapatan Operasional Lainnya	600	2.400	1.800	300,00%	
Laba (Rugi) Penyertaan Modal/ Kupon OK	209.084	292.805	83.721	40,04%	
Total Pend. Operasional	4.883.797	4.249.266	(634.531)	-12,99%	
Biaya Operasional diluar bunga & depresiasi					
Biaya Pegawai	3.080.396	3.049.867	(30.529)	-0,99%	
Biaya Perjalanan Dinas	119.588	110.287	(9.301)	-7,78%	
Biaya Pengembangan SDM	64.800	25.648	(39.153)	-60,42%	
Biaya Imbal Jasa Pasca Kerja	279.423	279.423	(0)	0,00%	
Biaya Umum & Administrasi	445.281	442.721	(2.560)	-0,57%	
Biaya Sewa	57.499	57.593	94	0,16%	
Biaya Profesional	150.532	124.847	(25.685)	-17,06%	
Biaya diluar bunga & depresiasi	4.197.519	4.090.385	(107.134)	-2,55%	
Laba (Rugi) diluar bunga & depresiasi	686.278	158.881	(527.397)	-76,85%	
Biaya Bunga Pinjaman LPDB KUKM	39.350	36.165	(3.185)	-8,09%	
Biaya Bunga Pinjaman PPA	1.132	-	(1.132)	-100,00%	
Biaya Bunga Pinjaman Bank BPD Bali	447.500	454.156	6.656	1,49%	
Biaya Bunga Pinjaman UMK Jasa Marga	91	-	(91)	-100,00%	
Biaya Penyisihan	289.802	-	(289.802)	-100,00%	
Biaya Depresiasi	215.711	145.730	(69.981)	-32,44%	
Biaya Akuisisi JBM	-	-	-	-	
Biaya Amortisasi	-	-	-	-	
Biaya Bunga & depresiasi	993.586	636.051	(357.534)	-35,98%	
LABA (RUGI) OPERASIONAL	(307.308)	(477.170)	(169.862)	55,27%	
Pend. Non Operasional :					
Bunga Deposito	560.104	652.002	91.898	16,41%	
Non Opr Lainnya	16.069	181.611	165.542	1030,19%	
Biaya Non Operasional :					
Biaya Administrasi Bank	5.004	6.537	1.533	30,64%	
Laba (Rugi) sebelum pajak	263.861	349.904	86.043	32,61%	
Pajak penghasilan ps 25	29.033	29.812	779	2,68%	
LABA (RUGI) STH PAJAK	234.828	320.092	85.264	36,31%	
RATIO - RATIO					
A INVESTMENT RATE (TOTAL)	10,84%	8,78%		-2,06%	
B INVESTMENT RATE (Pend.Bunga)	15,73%	15,56%		-0,17%	
C INVESTMENT RATE (Deposito)	3,36%	2,56%		-0,80%	
D NET INTEREST MARGIN (TOTAL)	9,87%	8,78%		-1,09%	
E OVERHEAD COST	8,31%	7,71%		-0,60%	
F PROFIT MARGIN	0,47%	0,61%		0,14%	
G RETURN ON EQUITY	0,49%	0,63%		0,14%	
H RETURN ON ASSET	0,44%	0,58%		0,14%	
I CURRENT RATIO	423,95%	1062,43%		638,48%	
J CASH RATIO	407,14%	1042,52%		635,38%	
K RATIO DANA VENTURA	-	-			
L RATIO KEGIATAN UMKM THP TOTAL KEGIATAN USAHA	87,11%	90,13%		3,02%	
M BOPO	106,29%	111,23%		4,94%	

1. Total aset per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp.62,668 miliar atau Rp.3,137 miliar (5,27%) di atas proyeksi, hal ini disebabkan karena total utang terealisasi Rp.7,190 miliar (73,76%) di atas proyeksi dan total ekuitas terealisasi Rp.55,478 miliar (0,15%) di atas proyeksi.
2. Total outstanding Investasi (bruto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 32,987 miliar atau Rp. 13,725 miliar di bawah proyeksi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Belum optimalnya kinerja bidang investasi
 - Investasi terealisasi Rp. 22,256 miliar dari Rp. 34,375 miliar yang ditargetkan.
 - Divestasi terealisasi sebesar Rp. 12,690 miliar dari Rp. 10,824 miliar yang diperkirakan.
3. NPIF Netto per 31 Desember 2025 adalah 1,48% atau 0,66% di bawah proyeksi .
4. Total utang terealisasi sebesar Rp. 7,190 miliar atau Rp. 3,052 miliar (73,76%) di atas proyeksi. Hal ini disebabkan karena dalam proyeksi diasumsikan pinjaman komersial (Bank BPD Bali) adalah sebesar Rp. 3 miliar, pada bulan Desember 2025.
5. Total ekuitas per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. 55,478 miliar atau Rp. 85 juta (0,15%) di atas proyeksi yang disebabkan karena :
 - Laba (rugi) berjalan terealisasi Rp. 85 juta di atas proyeksi.
6. Pendapatan operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4,249 miliar atau 635 juta (12,99%) di bawah proyeksi yang disebabkan karena:
 - Pendapatan bunga (terrealisasi Rp. 538 juta di bawah proyeksi).
 - Pendapatan Provinsi dan administrasi fee terealisasi Rp. 185 juta di bawah proyeksi.
 - Laba (Rugi) Penyertaan Modal dan obligasi konversi terealisasi Rp. 84 juta di atas proyeksi.
 - Pendapatan operasional lainnya terealisasi Rp. 1,8 juta di atas proyeksi
7. Biaya operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. 465 juta (8,95%) di bawah proyeksi. Tiga pos biaya terbesar yang terealisasi di bawah proyeksi adalah biaya penyisihan, biaya pengembangan SDM dan biaya depresiasi.
8. Pendapatan (beban) non operasional sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi Rp. 256 juta di atas proyeksi, yang disebabkan karena pendapatan bunga deposito terealisasi Rp. 92 juta di atas proyeksi , pendapatan non operasional lainnya terealisasi Rp. 166 juta di atas proyeksi dan biaya lainnya terealisasi Rp. 1,5 juta di atas proyeksi.
9. Laba (rugi) perusahaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 320 juta atau terealisasi Rp.85 juta di atas proyeksi yang disebabkan karena total pendapatan operasional terealisasi Rp. 635 juta (12,99%) di bawah proyeksi, total biaya operasional terealisasi Rp. 465 juta (8,95%) di bawah proyeksi, pendapatan (beban) lainnya terealisasi sebesar Rp 256 juta di atas proyeksi.

3.3.2. Produk dan Layanan BDF

BDF melakukan kegiatan usaha Modal Ventura kategori VDC (*Venture Debt Corporation*), sesuai POJK Nomor 25 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS).

BDF menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura yang meliputi:

1. Penyertaan Modal (Equity Participation).
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*Quasi equity participation*).
3. Pembiayaan melalui surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.
4. Pembiayaan .

Kegiatan Usaha Kategori VDC (*Venture Debt Corporation*) adalah perusahaan yang fokus pada pembiayaan melalui pembelian surat utang/sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembiayaan, dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

3.3.3. Kapasitas Teknis

Terkait kapasitas teknis saat ini, dimana produk jasa keuangan BDF adalah pembiayaan usaha produktif, penyertaan modal dan/atau

penyertaan melalui obligasi konversi (d disesuaikan dengan sumber dana yang dimiliki BDF), maka akses terhadap teknologi yang relevan, seperti sistem pelaporan dan pemantauan sangat penting. Layanan teknis yang diberikan adalah terkait pembayaran angsuran yang dapat dilakukan melalui jasa perbankan baik transfer maupun setor tunai yang mana saat ini perbankan telah menyediakan kemudahan untuk proses ini baik dengan internet banking maupun sms banking. Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, menyebabkan masyarakat ikut dalam perubahan perilaku yang menginginkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Kedepan, BDF akan berupaya untuk meningkatkan kapasitas teknis teknologi, tidak hanya untuk proses pembayaran angsuran namun untuk proses pengajuan pembiayaan.

a. Sistem Pelaporan

Untuk kapasitas teknis berupa sistem yang digunakan untuk pelaporan aktivitas keuangan perusahaan, BDF menggunakan *Focus Loan Management System* (FLMS) yang berbasis web sejak tahun 2020, FLMS adalah sebuah *core system* yang dapat mengakomodir proses pembiayaan dan keuangan. Saat ini BDF dalam proses transisi peralihan ke Sistem Keuangan Online (SKO) untuk mendukung proses operasional BDF selanjutnya.



BDF selalu menerapkan sistem back up data yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisasi adanya kemungkinan gangguan sistem, jaringan, kerusakan data hingga bencana alam.

b. Sistem Layanan Informasi Keuangan

BDF juga sudah menerapkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sejak BDF ditetapkan sebagai pelapor SLIK pada bulan September 2021. SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor SLIK, verifikasi untuk kerja sama pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

3.4 Strategi Komunikasi

3.4.1. Faktor Internal

1. Komunikasi Internal

Dalam hal penetapan tujuan dan prioritas keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya, komitmen serta dukungan dari

Manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program-program yang telah direncanakan. Menginformasikan kepada seluruh karyawan tentang pentingnya RAKB dan melibatkan mereka dalam proses implementasi.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan aksi keuangan berkelanjutan, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, disesuaikan dengan kapasitas usaha BDF. Infrastruktur, perangkat lunak, dan teknologi yang mendukung sudah mencukupi.

3. Kompetensi Pegawai

Salah satu faktor penting dalam menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan adalah kompetensi pegawai yang memadai. Oleh karena itu, BDF akan konsisten berupaya untuk membentuk sumber daya manusia yang handal melalui pendidikan dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. Selain itu, BDF berupaya mengembangkan organisasi untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi keuangan berkelanjutan.

4. Komunikasi Eksternal

Mengkomunikasikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti investor, pelanggan dan masyarakat.



3.4.2. Faktor Eksternal

1. Lingkungan dan iklim yang sehat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Menciptakan lingkungan yang sehat dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *go green* dalam kegiatan sehari – hari, antara lain *paperless*, mematikan perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan, menggunakan air secara lebih bijaksana, pengelolaan sampah dan lain sebagainya. BDF mendukung transformasi Ekonomi Bali dengan pilarnya “Bali Hijau”.
2. Kondisi perekonomian regional dan nasional merupakan faktor eksternal yang sangat dinamis dan dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan RAKB. BDF perlu secara proaktif memantau perkembangan kondisi ekonomi dan menyesuaikan RAKB-nya agar tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, BDF dapat membangun ketahanan bisnis yang lebih kuat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan
3. Kebijakan Pemerintah, regulasi, pemberian insentif dan investasi pemerintah terkait

lingkungan sosial dan tata kelola (ESG) akan berdampak langsung pada RAKB perusahaan.

4. Kondisi sosial dan budaya merupakan salah satu kunci bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Aksi Keuangan Berkelanjutan perlu memperhatikan faktor sosial dan menjunjung nilai kearifan lokal Sad Kerthi. BDF mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat sebagai *agent of development* yaitu dengan memberikan manfaat berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada pihak-pihak yang layak. Selain itu, kegiatan bisnis BDF seperti penyaluran pembiayaan mempertimbangkan bidang dan jenis usaha debitur agar tidak disalah gunakan untuk usaha yang bersifat negatif.
5. Pengawasan yang sehat dan efektif merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya informasi yang asimetris antara faktor-faktor yang terlibat dalam aktivitas operasional khususnya dalam implementasi program-program keuangan berkelanjutan.

3.5 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

3.5.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan monitoring atas kinerja seluruh bagian dalam perusahaan, mekanisme yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris, merupakan rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris perusahaan yang membahas kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun non keuangan untuk periode tertentu. Rapat Dewan Komisaris ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Manajemen, merupakan rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan yang membahas kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun non keuangan untuk periode tertentu. Rapat Manajemen ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Rapat Direksi, merupakan rapat antara Direksi dan karyawan yang membahas kinerja masing-masing bagian, hal-hal terkait kendala dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing bagian serta solusinya juga dibahas dalam rapat ini. Rapat Direksi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
4. Rapat Lainnya yang biasa dilaksanakan Direksi dan karyawan bagian tertentu untuk membahas program kerja bagian yang bersangkutan.

Waktu pelaksanaan rapat tergantung kebutuhan pembahasan yang harus dilakukan.

3.5.2 Mitigasi

BDF telah mempunyai bagian Manajemen Risiko dan Audit internal (SPI) dalam upaya memitigasi risiko, memonitor kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan risiko dalam lingkup aktivitas BDF dilaksanakan sesuai ketentuan OJK, yakni meliputi 8 (delapan) jenis risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik.

3.6 Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Kerjasama dengan pihak eksternal membawa banyak manfaat dalam pelaksanaan RAKB yaitu :

- Akses terhadap keahlian khusus
- Jaringan luas
- Perspektif yang berbeda
- Sumber daya tambahan
- Akses ke informasi terkini

Kerjasama dengan pihak eksternal merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat RAKB. Dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan, perusahaan dapat memperoleh manfaat yang signifikan dalam mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang.

4.1 Dasar Pemikiran

4.1.1 Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

BDF menetapkan prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 dan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal sebagaimana telah disebutkan dalam Bab 3 Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BDF tahun 2026. Dalam rangka mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam *Road Map* Aksi Keuangan Berkelanjutan BDF tahun 2026-2028, pada tahun 2026 BDF merencanakan kegiatan dan program kerja yaitu : meningkatkan portofolio; penanganan kredit bermasalah; penyesuaian kebijakan system dan prosedur terhadap penerapan prinsip-prinsip keuangan keberlanjutan, internalisasi dan implementasi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan berkolaborasi dengan mitra strategis

4.1.2 Kriteria dan Alasan Pemilihan Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Secara umum, tantangan eksternal yang dihadapi terkait implementasi keuangan berkelanjutan dari sudut pandang eksternal adalah masih rendahnya pemahaman mengenai penerapan keuangan berkelanjutan dan kurangnya perhatian serta kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan dari sudut pandang internal adalah belum memadainya pemahaman karyawan terhadap penerapan aksi keuangan berkelanjutan serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia BDF yang fokus untuk kegiatan ini. Kendati demikian, pengembangan akan terus diupayakan dan apabila diperlukan serta jumlah sumber daya manusia di BDF telah memadai, akan dibentuk unit khusus untuk menangani kegiatan aksi keuangan berkelanjutan tentu saja juga harus ditunjang dengan peningkatan kompetensi dibidang keuangan berkelanjutan.

4.1.3 Uraian Aktivitas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Adapun aktivitas dari implementasi Program Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

a. Penunjukan petugas

Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah tupoksi Keuangan Berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan. BDF tidak membentuk unit khusus tapi secara keseluruhan aksi keuangan berkelanjutan dikelola oleh Kepala Divisi Operasional dibantu dan didukung oleh manajemen risiko, bagian investasi, bagian operasional dan bagian sumber daya manusia (SDM).

Pengelola keuangan berkelanjutan yang berada dibawah supervisi Kepala Divisi Operasional akan selalu berkoordinasi dengan divisi Investasi sebagai supervisi untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk keselarasan kegiatan dan pelaporan termasuk juga dalam hal penyusunan laporan berkelanjutan.

b. Penyusunan Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan selaras dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Keuangan Berkelanjutan dan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai isu sosial dan lingkungan hidup, telah disusun Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pedoman ini juga dibutuhkan untuk menjadi panduan bagi Pengelola Keuangan Berkelanjutan untuk melaksanakan program dan aktivitas Keuangan Berkelanjutan.

c. Pelaksanaan edukasi internal bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti regulator dan lembaga/instansi terkait lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dibutuhkan edukasi internal secara menyeluruh. Adapun edukasi internal yang akan dilaksanakan mencakup sebagai berikut:

- Peningkatan Kapasitas Pengurus terkait Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan
- Peningkatan kompetensi karyawan tentang Aksi Keuangan Berkelanjutan
- Melakukan pelatihan kepada karyawan
- Kampanye peduli lingkungan kepada seluruh karyawan BDF

d. Implementasi target dan alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Aksi Keuangan Berkelanjutan, BDF melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menekankan kepada sektor pendidikan, kepedulian sosial, UMKM, ketertiban umum dan pelestarian lingkungan hidup.



4.2 Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Adapun secara rinci kegiatan rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggungjawab
1	Program peningkatan portofolio	Januari	Desember 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investasi ▪ Operasional ▪ Legal ▪ HRD 	Divisi Investasi
2	Penanganan kredit bermasalah	Januari	Desember 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legal ▪ Tim Remedial 	Divisi Legal
3	Penyesuaian kebijakan, sistem dan prosedur terhadap penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan	Maret	Juni 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HRD ▪ Investasi ▪ Operasional 	HRD
4	Internalisasi dan Implementasi Prinsip Keuangan Berkelanjutan	Maret	Desember 2026	Unit Kerja Terkait : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investasi ▪ Operasional ▪ HRD 	Kadiv Operasional
5	Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	Mei	Oktober 2026	HRD	HRD

4.3 Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL)

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah kepada segenap pemangku kepentingan, BDF mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BDF sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan. Implementasi dari program TJSL, BDF berpijak pada konsep pemberdayaan yang berkelanjutan, mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Bali di bidang pemberdayaan masyarakat dan selaras dengan pengembangan bisnis BDF

a. Sektor Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

BDF Mendukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, menuju Bali Era Baru: Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan merupakan kolaborasi antara Bappenas dan Pemerintah Provinsi Bali yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Desember 2021.

The infographic consists of six vertical panels, each representing a pillar of Bali's economic transformation. Each panel has a title, a background image, and a list of key initiatives.

- Bali Pintar dan Sehat** (Blue background):
 - Peningkatan Kualitas pendidikan di Semua Jenjang
 - Peningkatan Kualitas dan Modernisasi Pendidikan Vokasi
 - Mendorong Research & Development di Bali
 - Dukungan hak kekayaan intelektual
 - Mendorong pendirian universitas luar negeri yang berkualitas di Bali
 - Mendorong *medical tourism* dan *wellness tourism*
 - Meningkatkan ketahanan gizi dan Kesehatan masyarakat Bali
- Bali Produktif** (Orange background):
 - Peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah
 - Modernisasi Pertanian
 - Penguatan Pariwisata
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Penguatan Industrialisasi
 - Penguatan UMKM
- Bali Hijau** (Green background):
 - Pengembangan Energi Bersih (Peningkatan Bauran Energi)
 - Transformasi Pengelolaan persampahan
 - Penggunaan Transportasi Bersih
 - Penanganan Perubahan Iklim Melalui Transformasi Hijau
 - Pengembangan *Blue Economy*
- Bali Terintegrasi** (Dark Blue background):
 - Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas
 - Pengembangan Bali menjadi Hub Logistik Udara
 - Pengembangan Kerjasama Bali- Nusa Tenggara (Nusra) – Jawa Timur (Khususnya Bagian Timur)
 - Pengembangan skema inovatif untuk Pembiayaan Infrastruktur (Khususnya Konektivitas)
- Bali Smart Island** (Light Blue background):
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia Terampil Digital
 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur Digital
 - Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Kreatif
 - Optimalisasi Layanan Wisata Menuju Bali sebagai *Smart Island Destination*
 - Akselerasi Digitalisasi Pemerintahan Daerah
- Bali Kondusif** (Light Grey background):
 - Penguatan Keuangan Daerah
 - Peningkatan dukungan lembaga keuangan
 - Penguatan Perbaikan Kemudahan Berusaha
 - Penguatan Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

b. Rencana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) BDF Tahun 2026

Untuk program TJSL di tahun 2026 yang berkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan, BDF merencanakan menyalurkan dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) BDF Tahun 2026

Jenis Kegiatan CSR	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan
Program bantuan dan penyediaan tong sampah di Negara	Kebersihan dan kesehatan masyarakat.	Alokasi dana Rp 10.000.000,- periode pelaksanaan bulan Mei 2026.

c. Kegiatan Literasi & Inklusi Keuangan

PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF) turut serta mendukung program literasi keuangan yang diinisiasi oleh pemerintah. Kegiatan literasi & inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan perencanaan keuangan, pengenalan produk/jasa keuangan (manfaat, risiko, hak, dan kewajiban) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Selain memenuhi ketentuan regulasi, kegiatan edukasi dan literasi keuangan juga dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan BDF kepada masyarakat. Untuk tahun 2026 kegiatan literasi & inklusi akan dilakukan di wilayah Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar. Rencana kegiatan akan dilakukan pada bulan Mei dan Oktober 2026.

4.4 Sumber Daya

4.4.1 Pihak yang Bertanggungjawab

BDF menugaskan Kepala Divisi Operasional sebagai pengelola aktivitas dan program kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan tugas dan tanggung jawab penyusunan RAKB tahun 2026. Dalam laporan berkelanjutan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait dengan Aksi Keuangan Berkelanjutan Kepala Divisi Operasional berkoordinasi dengan sejumlah unit sebagai berikut:

Tabel 4.3 Unit Terkait Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Aktivitas/Program Kerja	Unit Kerja Terkait
Penunjukan Kepala Divisi Operasional	Bagian Sumber Daya Manusia
Penyusunan Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan	Bagian Sumber Daya Manusia
Pelatihan Terkait Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan	Bagian Investasi - Bagian Sumber Daya Manusia - Bagian Investasi
Monitoring Realisasi Penerapan Penyaluran Kredit Kepada Kegiatan Usaha Keberlanjutan	- Bagian Operasional (Akuntansi, Keuangan, dan Administrasi Investasi)
Pelaporan Realisasi Penyaluran Kredit Kepada Kegiatan Usaha Berkelanjutan.	- Kepala Divisi Operasional

4.4.2 Anggaran

Rencana anggaran untuk program dan aktivitas keuangan berkelanjutan BDF Tahun 2026 adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diluar dari anggaran Program TJSJL BDF. Kegiatan inklusi dan edukasi sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) serta biaya pelatihan karyawan sebesar Rp. 64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun penyaluran kredit/pembiayaan kepada debitur dianggarkan sebesar Rp. 33.098.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta rupiah), termasuk usaha yang mendukung keberlanjutan.

4.4.3 Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan, PT. Bali Kerthi Development Fund Ventura apabila diperlukan akan melibatkan pihak lain / pihak ketiga dalam hal:

- a. Pelatihan, edukasi ataupun sosialisasi terkait penerapan aksi keuangan berkelanjutan
- b. Konsultasi penyusunan pedoman perusahaan tentang aksi keuangan berkelanjutan
- c. Sosialisasi/pelatihan penyusunan laporan keberlanjutan

4.5 Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Keberhasilan dari pelaksanaan Program dan Aktivitas Keuangan Berkelanjutan ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Membandingkan realisasi Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan timeline dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.
- b. Membandingkan realisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan timeline, anggaran dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.
- c. Membandingkan realisasi Penyaluran Kredit kepada kegiatan usaha kategori berkelanjutan dengan anggaran dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.

Untuk melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Program dan Aktivitas Keuangan Berkelanjutan, diperlukan sistem pelaporan terhadap realisasi Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Penyaluran Kredit kepada kegiatan usaha kategori berkelanjutan secara berkala.



5.1 PIC Penanggung Jawab Monitoring & Evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam melakukan monitoring Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan PIC untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan aksi keuangan berkelanjutan. Adapun *Person In Charge* (PIC) untuk monitoring & evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

Uraian kegiatan	PIC
Monitoring realisasi penunjukan pelaksana kegiatan aksi keuangan berkelanjutan.	Bagian HRD
Monitoring realisasi penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan keuangan berkelanjutan.	Kepala Divisi Operasional
Monitoring realisasi pelaksanaan edukasi internal terkait kegiatan aksi keuangan berkelanjutan.	Bagian HRD
Monitoring realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Bagian Investasi
Monitoring realisasi penyaluran pembiayaan ke UMKM	Bagian Operasional (Akunting, Keuangan, Administrasi Investasi)
Monitoring risiko kredit	Manajemen Risiko
Evaluasi Program Aksi Keuangan Berkelanjutan	Bagian Investasi

5.2 Penentuan Waktu Untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan pengukuran secara berkala yang dilaporkan kepada Direksi. Adapun pelaporan berikut dengan penentuan waktu untuk melakukan pengukuran realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut :

Tabel 5.2 Periode Pengukuran Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Aktivitas				Periode	PIC
Laporan	Program	Aksi	Keuangan	Tahunan	Kepala Divisi Operasional
Berkelanjutan					
Laporan Berkelanjutan				Tahunan	Kepala Divisi Operasional

5.3 Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai dengan program kerja dan *timeline* yang telah direncanakan, BDF akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- a) Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk penyusunan RAKB periode berikutnya.
- b) Melakukan revisi atas RAKB.
- c) Mengkaji ulang pedoman pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan yang disusun, jika terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan maka akan dilakukan penyesuaian.

5.4 Mitigasi Risiko

5.4.1 Pemetaan Risiko

Tidak berjalannya Aksi Keuangan Berkelanjutan dapat berdampak pada sejumlah jenis risiko yang dikelola BDF. Adapun pemetaan risiko terhadap Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Pemetaan Risiko Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan

Jenis Risiko	Potensi Risiko
Risiko Kredit	Pelaku kegiatan usaha kategori berkelanjutan gagal memenuhi kewajibannya
Risiko Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis karena tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan • Berpengaruh terhadap nilai Tingkat Kesehatan BDF
Risiko Strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan • Pencapaian kinerja penyaluran kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan
Risiko Reputasi	<ul style="list-style-type: none"> • Opini tidak memiliki kepedulian terhadap isu ekonomi berkelanjutan dan isu lingkungan hidup jika BDF tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan • Reputasi negatif dari otoritas dikarenakan BDF yang tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan akan diberikan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis

5.4.2 Manajemen Risiko Atas Program Aksi Keuangan Berkelanjutan

a. Tata Kelola Risiko

1. Pembentukan tim kerja pengelola keuangan berkelanjutan
2. Penyusunan Kebijakan berupa Pedoman Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan.
3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan termasuk kepada penyaluran kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan.
4. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki *awareness* dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. Pengurus melakukan peran dan tanggung jawabnya dan menjadi *role model* dalam rangka meningkatkan citra BDF kepada *stakeholder*.
5. Penanganan setiap berita yang terkait dengan BDF dan selalu dilakukan klarifikasi agar berita (khususnya yang bersifat negatif) tidak membahayakan bisnis BDF.
6. Penerapan RBT dan RAKB yang telah disetujui Dewan Komisaris untuk mencapai target yang telah ditentukan.

b. Kerangka Manajemen Risiko

1. Strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat risiko dan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. BDF telah memiliki karyawan bagian Manajemen Risiko yang berfungsi memperkuat implementasi fungsi Manajemen Risiko.
2. Kecukupan atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang sejalan dengan pengelolaan risiko seperti penetapan kewenangan memutus penyaluran pembiayaan dengan plafond tertentu oleh Direksi dan Komisaris serta batas maksimal plafond pemberian kredit kepada satu orang debitur sesuai ketentuan POJK.
3. Strategi pengelolaan risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan dalam menangani masalah Risiko Reputasi akan disampaikan ke Direksi dibantu oleh bagian SPI dan Legal.
4. Rencana bisnis disusun oleh Direksi bersama seluruh Pejabat BDF yang dikoordinasi oleh Kepala Divisi Operasional telah sejalan dengan sasaran strategis bisnis BDF secara keseluruhan serta telah disosialisasika dengan baik pada seluruh level organisasi. Manajemen konsentrasi terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan performa layanan.
5. Menjaga seluruh kebijakan dan prosedur yang telah dibuat serta melaksanakan fungsi masing-masing bagian sesuai dengan kebijakan & prosedur yang telah ditetapkan.

c. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia

1. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Sistem Informasi Manajemen dan Pengendalian Risiko
2. Kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung proses manajemen risiko
3. Sistem Pengendalian Risiko dilakukan dengan cara saling koordinasi antara Kepala Divisi Operasional dan bagian lain terhadap setiap laporan yang wajib dilaporkan ke Otoritas, dimana kegiatan pemantauan tersebut telah menjadi agenda didalam kerangka kerja perbaikan tata kelola perusahaan.
4. Saling berkoordinasi setiap unit terkait dalam rangka *review* dan penyempurnaan terhadap PP/SOP/Ketentuan/Kebijakan Internal BDF guna mendukung proses bisnis.
5. Managemen Risiko BDF secara konsisten menerapkan manajemen risiko dalam setiap aktivitas usaha termasuk pada aktivitas operasional dan non operasional. Penerapan manajemen risiko juga menjadi kepedulian setiap tingkat organisasi di BDF. Pengelolaan risiko di BDF mencakup 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan.

Peringkat Profil Risiko Tahun 2024			
Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Strategis	2	2	2
Risiko Operasional	2	2	2
Risiko Kredit	2	2	2
Risiko Pasar	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	2	2
Risiko Hukum	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2
Risiko Reputasi	2	2	2
Peringkat Komposit	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat Profil Risiko

PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF) sebagai perusahaan modal ventura menyadari pentingnya mengintegrasikan nilai keberlanjutan kedalam visi dan misi BDF. BDF walau kapasitas usaha masih tergolong kecil, berkeinginan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menerapkan nilai-nilai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam kegiatan bisnis.

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026 yang dapat kami sampaikan sebagai acuan pelaksanaan di Tahun 2026. Terima kasih.

Denpasar, 24 November 2025

Hormat Kami,

DIREKSI PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA



I Made Gunawirawan

Direktur Utama



A.A.I.A Maharani

Direktur